DAFTAR PUSTAKA

, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor /1 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Jakarta: Diperbanyak oleh
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubaha
atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. (2013). Depok: Diperbanyak oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Depok.
, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah. (2011). Depok: Diperbanyak oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Depok.
Anggoro, D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.

- Hasanah, M., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Bogor: In Media.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2016). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 23 Tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Komite Standar Pemerintahan. (2019).Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugianto. (2008). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Wulandari, P., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish